

Pengaruh Apatisme Politik terhadap Kualitas Pemerintahan : Studi Kuantitatif pada Masyarakat Kota Tangerang

Farhan Fahrizal¹, Selamet Setiawan², Rizal Darma Putra³

^{1,2}Universitas Muhamadiyah Tangerang

³Universitas Yuppentek Indonesia

Email: ¹farhanpahrizal27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba memahami apakah sikap apatis terhadap politik berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan di Kota Tangerang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM melalui aplikasi SmartPLS. Dari total populasi sekitar 1.965.000 penduduk, penelitian ini mengambil 100 responden yang dipilih secara stratified random sampling dari 13 kecamatan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin yang mengukur dua hal utama, yaitu apatisme politik dan kualitas pemerintahan. Dari hasil pengujian, instrumen yang digunakan sudah cukup baik. Nilai validitas dan reliabilitasnya memenuhi standar, yang berarti pertanyaan dalam kuesioner memang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan hasilnya juga konsisten. Nilai R-square sebesar 0,430 menunjukkan bahwa apatisme politik bisa menjelaskan sekitar 43% variasi dalam kualitas pemerintahan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Untuk hasil utamanya, ditemukan bahwa apatisme politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,656, dengan t-statistik 8,869 dan p-value 0,000. Artinya, hubungan ini secara statistik cukup kuat dan bisa dipercaya. Menariknya, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat apatisme politik masyarakat, justru semakin tinggi pula penilaian mereka terhadap kualitas pemerintahan. Secara sederhana, penelitian ini menyimpulkan bahwa apatisme politik tidak selalu berdampak buruk. Dalam kondisi tertentu, sikap “tidak terlalu peduli” terhadap politik bisa jadi mencerminkan bahwa masyarakat merasa pemerintahan sudah berjalan dengan baik, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk terlalu terlibat. Temuan ini bisa jadi bahan refleksi bahwa hubungan antara masyarakat dan politik tidak selalu hitam-putih, dan perlu dilihat dengan sudut pandang yang lebih fleksibel.

Kata kunci: *apatisme politik, kualitas pemerintahan, good governance, partisipasi politik*

Abstract

This study seeks to understand whether apathy toward politics affects the quality of governance in Tangerang City using a quantitative approach. The analysis was conducted using the PLS-SEM method via the SmartPLS software. From a total population of approximately 1,965,000 residents, this study selected 100 respondents through stratified random sampling from 13 subdistricts. Data were collected using a questionnaire with a five-point Likert scale measuring two main aspects: political apathy and governance quality. The results of the validation tests indicate that the instrument used is sufficiently reliable and valid. Its validity and reliability meet established standards, meaning the questionnaire's questions effectively measure the intended constructs, and the results are consistent. An R-square value of 0.430 indicates that political apathy can explain approximately 43% of the variation in governance quality, while the remainder is influenced by other factors outside the scope of this study. Regarding the main findings, it was found that political apathy has a positive and significant influence on governance quality. This is evident from the path coefficient of 0.656, with a t-statistic of 8.869 and a p-value of 0.000. This means the relationship is

statistically strong and reliable. Interestingly, the results suggest that the higher the level of political apathy among the public, the higher their assessment of governance quality. Simply put, this study concludes that political apathy does not always have a negative impact. Under certain conditions, an attitude of “not caring too much” about politics may reflect that the public feels the government is functioning well, so they do not feel the need to get overly involved. This finding serves as food for thought that the relationship between the public and politics is not always black and white, and needs to be viewed from a more flexible perspective.

Keywords: political apathy, quality of governance, good governance, political participation

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu unsur krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keterlibatan publik tidak sekadar menjadi media untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berperan sebagai alat pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tingkat partisipasi yang tinggi akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dinamika perkembangan demokrasi juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya apatisisme politik di tengah masyarakat. Sikap apatis ini dapat dilihat dari menurunnya ketertarikan terhadap isu-isu politik dan pemerintahan, rendahnya kepedulian terhadap proses demokrasi, serta minimnya keterlibatan dalam mengawasi kebijakan publik (Nweke et al., 2019). Kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aktor politik, serta munculnya anggapan bahwa keterlibatan politik tidak membawa dampak yang berarti. Sikap apatis ini kemudian berdampak pada melemahnya peran kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Minimnya partisipasi masyarakat berpotensi menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dewi et al., 2022). Dalam kerangka teori partisipasi politik dan good governance, kualitas pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan institusi pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik. Dengan demikian, penelitian mengenai dampak apatisisme politik terhadap kualitas pemerintahan menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan demokratis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPU Kota Denpasar, pada Pilwali Kota Denpasar tahun 2010 jumlah angka golput tercatat sebanyak 38,37 persen, kemudian pada Pilwali tahun 2015 meningkat menjadi 42,35 persen. Dan pada Pilwali tahun 2020 meningkat kembali menjadi 46 persen (Made & Darma, 2025). Fenomena tingginya angka golput di kalangan pemuda Jakarta mencerminkan tumbuhnya sikap apatis terhadap politik. Sikap tersebut muncul sebagai akibat dari rendahnya kepercayaan serta minimnya kepedulian mereka terhadap sistem politik yang berlaku (Kompasiana.com, 2024).

Berbagai penelitian terkait apatisisme politik dan kualitas pemerintahan telah dilakukan oleh sejumlah akademisi dengan sudut pandang serta pendekatan metodologis yang beragam. Secara umum, studi-studi sebelumnya memosisikan apatisisme politik sebagai fenomena yang memiliki keterkaitan kuat dengan tingkat partisipasi politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Nweke et al., 2019) mendefinisikan apatisisme politik sebagai sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap proses politik yang ditandai dengan rendahnya minat mengikuti isu politik dan minimnya keterlibatan dalam aktivitas demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa apatisisme politik dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap elite politik dan keyakinan bahwa partisipasi publik tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan publik. Temuan tersebut menegaskan bahwa apatisisme berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan demokratis. (Putra et al., 2025) menunjukkan bahwa meningkatnya apatisisme politik di kalangan pemilih muda berkorelasi dengan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap institusi politik formal. Melalui pendekatan survei komparatif, Dalton menyimpulkan bahwa generasi muda cenderung menjauh dari politik elektoral karena merasa tidak terwakili oleh sistem yang ada. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi politik dalam demokrasi modern. (Prasetyo et al., 2022) dalam penelitiannya di Indonesia menekankan bahwa apatisisme politik berpengaruh terhadap melemahnya prinsip-prinsip good governance. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengawasan publik terhadap pemerintah menjadi tidak optimal, sehingga transparansi dan akuntabilitas sulit diwujudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan hubungan negatif antara tingkat apatisisme politik dan kualitas pemerintahan. (Edwards & Foley, 1998) Putnam

melalui konsep *social capital* menjelaskan bahwa rendahnya keterlibatan warga dalam kehidupan politik mencerminkan melemahnya modal sosial. Putnam menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan prasyarat penting bagi pemerintahan yang efektif dan responsif. Ketika apatisme meningkat, kualitas tata kelola pemerintahan cenderung mengalami penurunan. (Cabui, 2022) menyoroti apatisme politik sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi. Norris menemukan bahwa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik mendorong masyarakat untuk menarik diri dari proses politik. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas representasi dan legitimasi pemerintahan. (Hapsari, 2022) bahwa apatisme politik di kalangan pemuda tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan politik, tetapi juga oleh sikap sinis terhadap aktor politik. Penelitian ini menegaskan bahwa apatisme berkontribusi pada rendahnya partisipasi elektoral dan melemahnya kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah. (Rasyd Gunawan, 2025) menemukan bahwa tingginya angka golput dalam pemilihan kepala daerah mencerminkan meningkatnya apatisme politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih berdampak pada berkurangnya legitimasi pemerintah daerah serta menurunnya kualitas pelayanan publik. (Aryadi, 2024) mengungkapkan bahwa apatisme politik berhubungan dengan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat yang apatis cenderung pasif dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga pemerintah kurang terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Ayunda et al., 2025) menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya apatisme politik berbanding terbalik dengan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek responsivitas dan efektivitas kebijakan. (Salma & Muslim, 2025) menekankan bahwa apatisme politik merupakan tantangan serius bagi demokrasi, karena dapat melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Apatisme yang berlangsung secara terus-menerus dapat berpotensi mendorong terbentuknya pemerintahan yang kurang akuntabel serta tidak peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan studi-studi terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa apatisme politik memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas pemerintahan. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh apatisme politik terhadap kualitas pemerintahan pada tingkat lokal, khususnya di Kota Tangerang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi celah tersebut dan memperkaya kajian ilmu pemerintahan.

LITERATURE REVIEW

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu konsep penting dalam kajian demokrasi yang merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses politik untuk memengaruhi keputusan publik. Secara sederhana, partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Arniti, 2020). Artinya, partisipasi politik tidak hanya sebatas ikut memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup bentuk keterlibatan lain seperti berdiskusi tentang isu politik, ikut kampanye, bergabung dalam organisasi, hingga terlibat dalam aksi bersama. Dalam konteks demokrasi saat ini, tingkat partisipasi politik sering digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat seberapa baik kualitas demokrasi di suatu negara (Averus & Alfina, 2020).

Menurut (Andriyendi et al., 2023) partisipasi politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari bentuk yang bersifat pasif, seperti mengikuti perkembangan berita politik, hingga bentuk yang lebih aktif, seperti menjadi anggota partai politik atau terlibat langsung dalam kegiatan kampanye. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki sifat multidimensional serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, maupun psikologis. Penelitian selanjutnya juga memperluas klasifikasi tersebut dengan memasukkan bentuk partisipasi non-konvensional, seperti demonstrasi dan aksi protes, sebagai bagian dari dinamika politik kontemporer (Riyanti et al., 2023).

Dalam perspektif teoritis, Teori Pilihan Rasional menjelaskan partisipasi politik sebagai hasil perhitungan rasional individu terhadap manfaat dan biaya dari suatu tindakan politik. Individu cenderung enggan berpartisipasi dalam aksi kolektif apabila manfaat yang

diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Dwitama et al., 2022). Melalui *calculus of voting*, yang menjelaskan bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh probabilitas kemenangan, manfaat kebijakan, dan biaya partisipasi. Namun, pendekatan rasional ini sering dikritik karena kurang mampu menjelaskan partisipasi politik yang bersifat altruistik atau berbasis nilai (Indrawan et al., 2021)

Sebagai respons terhadap keterbatasan teori rasional, Pengembangan Civic Voluntarism Model yang menekankan tiga faktor utama penentu partisipasi politik, yaitu sumber daya (resources), keterlibatan psikologis (engagement), dan rekrutmen sosial (mobilization)(Inzana et al., 2024). Model ini menjelaskan bahwa individu akan berpartisipasi jika mereka memiliki sumber daya yang memadai, merasa peduli terhadap politik, dan mendapatkan dorongan dari lingkungan sosialnya. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik warga negara (Alfarisyi et al., 2023).

Selain itu, pendekatan dari sisi psikologis seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga sering digunakan untuk memahami perilaku partisipasi politik. Dalam teori ini, niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga hal utama, yaitu sikap pribadi, norma atau tekanan sosial, serta sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas perilakunya (Adnyanaesa & Sutarna, 2023). Jika dikaitkan dengan konteks politik, TPB membantu menjelaskan bagaimana pandangan seseorang terhadap isu politik, serta pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya, dapat membentuk keinginan untuk ikut terlibat baik dalam pemilu maupun aktivitas politik lainnya (Mii et al., 2023). Lebih lanjut, ketika TPB dikombinasikan dengan *Civic Voluntarism Model*, kemampuan untuk memprediksi perilaku partisipasi politik menjadi lebih kuat. Penggabungan kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam dunia politik (Pratama et al., 2024)

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Rendahnya literasi politik dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik menjadi faktor penghambat utama partisipasi (Kahpi & Harahap, 2024). partisipasi politik dalam pemilu legislatif cenderung

bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran politik yang substantif (Awaliah et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh fenomena apatisme politik, khususnya di kalangan pemilih muda (Anggraini et al., 2022).

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi turut mendorong munculnya bentuk baru partisipasi politik yang berlangsung melalui media sosial. Platform digital ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan politik, khususnya di kalangan generasi muda, terutama dalam bentuk diskusi publik dan penyebaran informasi politik (Huljanna, 2022). Namun demikian, partisipasi politik berbasis digital juga memiliki keterbatasan. Keterlibatan yang terjadi di ruang daring tidak selalu berlanjut pada partisipasi politik konvensional, seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum maupun aktivitas politik formal lainnya (Asgar, 2023).

Secara umum, berbagai literatur menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor struktural, psikologis, serta sosial. Tidak terdapat satu teori tunggal yang mampu menjelaskan secara menyeluruh dinamika partisipasi politik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan perspektif rasional, sosiologis, dan psikologis menjadi kerangka analisis yang paling tepat untuk memahami pola partisipasi politik dalam masyarakat kontemporer (Hafizi, 2023).

Teori Good Governance

Good governance merupakan konsep penting dalam kajian administrasi publik dan ilmu pemerintahan yang berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap reformasi sektor publik dan demokratisasi. Istilah ini mulai banyak dikenal sejak diperkenalkan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP pada awal 1990-an. Secara umum, good governance dipahami sebagai cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk mendukung pembangunan, dengan menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Nagar & Pradesh, 2023).

Seiring perkembangannya, konsep ini semakin diperluas dengan menekankan berbagai prinsip utama, seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi

pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas (Sawmar & Mohammed, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, good governance tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan melibatkan peran sektor swasta dan masyarakat sipil (Nurhidayat, 2023). Secara konseptual, good governance juga berkaitan dengan pergeseran dari konsep government ke governance. Jika sebelumnya pemerintah diposisikan sebagai aktor utama, dalam pendekatan governance hubungan yang terbentuk menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak di luar negara. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan (Ramdhan et al., 2024). Pandangan ini sejalan dengan Pierre dan Peters (2000) yang menekankan bahwa governance lebih mengutamakan koordinasi yang bersifat horizontal dibandingkan dengan pendekatan birokrasi yang kaku dan hierarkis. (Ramdhan et al., 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, melalui konsep *reinventing government* menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan orientasi pada hasil sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Pendekatan ini kemudian diperkuat oleh paradigma *New Public Management* (NPM) yang menekankan kinerja, akuntabilitas, dan mekanisme pasar dalam sektor publik (Iskandar et al., 2021). Meskipun demikian, sejumlah kritik menyebutkan bahwa NPM cenderung mengabaikan nilai demokrasi dan keadilan sosial, sehingga good governance dipandang sebagai pendekatan yang lebih seimbang karena mengintegrasikan efisiensi dan partisipasi (Marhadila et al., 2024).

Dalam konteks negara berkembang, good governance kerap dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti praktik korupsi, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan adalah Worldwide Governance Indicators (WGI), yang mencakup enam dimensi utama, yaitu voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, serta control of corruption. Berbagai indikator tersebut banyak dimanfaatkan dalam penelitian empiris sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kualitas good governance di berbagai negara,

khususnya dalam melihat kinerja pemerintahan secara lebih komprehensif (Azan et al., 2021).

Di Indonesia, konsep good governance menjadi agenda utama pasca reformasi 1998. Penerapan good governance di Indonesia diarahkan pada upaya memperkuat akuntabilitas publik, transparansi birokrasi, dan partisipasi masyarakat (Maolani et al., 2023). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas serta kinerja pemerintah daerah (Rusdy & Flambonita, 2023). Namun demikian, implementasi good governance masih menghadapi berbagai tantangan, terutama budaya birokrasi yang hierarkis dan praktik korupsi yang persisten (Israr & Syofyan, 2022).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam good governance karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi publik yang bermakna dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan kualitas keputusan publik (Hidayati & Suwanda, 2022). Dalam era digital, partisipasi ini juga berkembang melalui e-government yang mendorong transparansi dan akses informasi publik. Namun, efektivitas e-government sangat bergantung pada kapasitas institusi dan literasi digital masyarakat (Mozin et al., 2025).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa good governance merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya berfokus pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan inklusivitas (Sukawati et al., 2022). Implementasi good governance membutuhkan komitmen politik, reformasi institusional, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, good governance tidak dapat dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses berkelanjutan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik (Wole et al., 2021).

METODE PENELITIAN

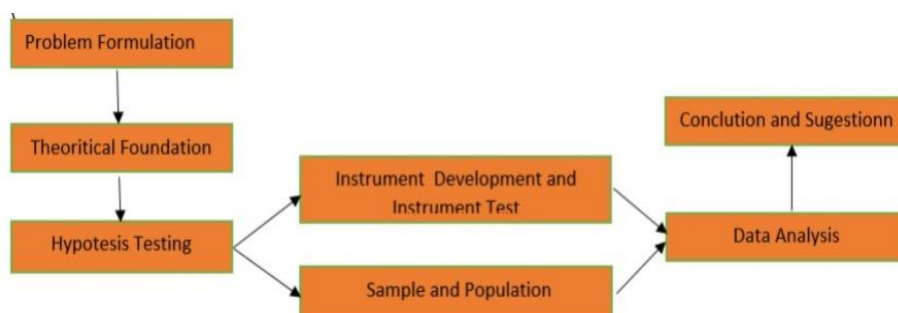
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Structural Equation Modeling (SEM) yang dijalankan melalui aplikasi SmartPLS. Pemilihan metode Partial Least Squares-SEM (PLS-SEM) didasarkan pada beberapa pertimbangan. Metode ini dianggap cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan prediktif, karena mampu menganalisis

hubungan yang cukup kompleks antar variabel laten sekaligus melihat pengaruh yang dihasilkan. Selain itu, PLS-SEM dikenal cukup fleksibel dalam mengolah model yang melibatkan banyak konstruk dan indikator. Metode ini juga tidak terlalu bergantung pada ukuran sampel yang besar, sehingga tetap dapat digunakan secara efektif. Meskipun dalam penelitian ini jumlah responden mencapai 400 orang, PLS-SEM tetap mampu memberikan hasil estimasi yang stabil dan dapat diandalkan. Keunggulan lainnya adalah tidak adanya asumsi distribusi normal, sehingga metode ini cocok digunakan pada data survei yang cenderung tidak berdistribusi normal, sebagaimana dalam penelitian ini. Penentuan ukuran sampel minimum dilakukan menggunakan pendekatan rumus akar kuadrat terbalik dan gamma-eksponensial, yang memastikan bahwa jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi kebutuhan kekuatan statistik untuk mendeteksi hubungan antar variabel secara signifikan. Selanjutnya, metode SEM digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang telah dirumuskan dalam model penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apatisme Politik (X)
2. Kualitas Pemerintahan

Gambar 3 menunjukkan tahapan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Proses penelitian dimulai dengan Formulasi Masalah, diikuti oleh Landasan Teoritis, dan Uji Hipotesis. Setelah itu, tahapan berikutnya melibatkan Pengembangan Alat dan Uji Alat, diikuti oleh Tahap Sampel dan Populasi, serta Analisis Data. Akhirnya, studi ini ditutup dengan Kesimpulan dan Saran.

Figure 3.
Research Stages



Sumber: (Cresswell, 2018)

Populasi dan Sampel

1. Populasi: Masyarakat Kota Tangerang
2. Sampel: Studi ini menggunakan metode sampling acak berstrata dengan sampel dari 13 kecamatan di Kota Tangerang. Kerangka sampling adalah Masyarakat Kota Tangerang yang datanya diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang . Responden dipilih secara acak dari setiap kecamatan, dengan alokasi proporsional berdasarkan jumlah pemilih aktif.
3. Ukuran Sampel: Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, populasi ini berjumlah 1.965.000 jiwa.
4. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang sudah diketahui. Dalam penelitian ini, dengan menetapkan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%, diperoleh hasil bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 100 responden.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang menggabungkan saluran online dan offline. Kuesioner didistribusikan melalui platform online (media sosial) untuk memastikan akses yang luas dan efisiensi, serta melalui pengumpulan offline di beberapa lokasi strategis di setiap kecamatan untuk menjangkau peserta yang lebih sulit dijangkau secara online. Tingkat respons yang diharapkan adalah 80%, dengan langkah pengingat dan tindak lanjut untuk memastikan tingkat partisipasi yang tinggi. Untuk mengatasi bias non-respons, strategi pengendalian yang digunakan meliputi pengiriman pengingat berkala kepada responden yang belum merespons dan memastikan partisipasi berbagai strata (berdasarkan kecamatan dan karakteristik demografis) tercatat secara proporsional, sesuai dengan teknik sampling acak berstrata yang digunakan.
2. Skala Pengukuran: Likert menggunakan skala 5 poin, dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”.

3. Etika dan Persetujuan: Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etika Penelitian (Institutional Review Board/IRB), sehingga seluruh prosesnya dipastikan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Sebelum berpartisipasi, setiap responden baik yang mengisi kuesioner secara online melalui Google Form maupun secara offline terlebih dahulu diberikan penjelasan tertulis mengenai tujuan penelitian, prosedur yang dilakukan, serta hak-hak mereka, termasuk hak untuk berhenti kapan saja tanpa konsekuensi. Persetujuan juga dikumpulkan secara elektronik sebelum responden mulai mengisi kuesioner. Untuk menjaga keamanan data, penelitian ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Informasi yang diberikan responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Data yang terkumpul juga dianonimkan agar identitas responden tetap terlindungi, serta tidak akan dibagikan kepada pihak lain tanpa izin yang jelas dari responden.

Alat Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner survei yang disusun untuk mengukur tingkat apatisme politik serta hubungannya dengan kualitas pemerintahan. Kuesioner ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara apatisme politik dan kualitas pemerintahan. Penyusunan instrumen mengacu pada sejumlah indikator utama yang merepresentasikan dua variabel pokok, yaitu apatisme politik dan kualitas pemerintahan.

Tabel Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Apatisme Politik	Ketidakpedulian terhadap isu politik
		Ketidakpercayaan terhadap institusi politik
		Rendahnya minat berpartisipasi dalam politik
		Perasaan tidak berdaya secara politik
		sikap sinisme terhadap aktor politik
2	Kualitas Pemerintahan	Transparansi pemerintahan
		Akuntabilitas publik

		Efektivitas pemerintahan
		Kualitas pelayanan publik
		Supremasi hukum
		Kontrol terhadap korupsi

Tabel Pertanyaan

No	Indikator	Pertanyaan
1	Ketidakpedulian terhadap isu politik	Saya jarang mengikuti berita atau informasi tentang isu politik
	Ketidakpercayaan terhadap institusi politik	Saya tidak percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat
	Rendahnya minat berpartisipasi dalam politik	Saya tidak tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan politik, seperti kampanye atau diskusi politik
	Perasaan tidak berdaya secara politik	Saya merasa masyarakat biasa tidak memiliki kekuatan dalam politik
	sikap sinisme terhadap aktor politik	olitisi lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat
2	Transparansi pemerintahan	emerintah memberikan informasi kebijakan secara terbuka kepada masyarakat.
	Akuntabilitas publik	Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat
	Efektivitas pemerintahan	Pemerintah mampu bekerja secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah publik
	Kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik yang diberikan pemerintah sudah memuaskan
	Supremasi hukum	Hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status atau jabatan
	Kontrol terhadap korupsi	Pemerintah serius dalam memberantas praktik

		korupsi
--	--	---------

KERANGKA TEORI

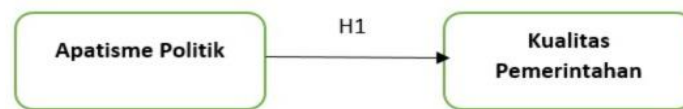
Apatisme Politik

Apatisme politik merujuk pada sikap ketidakpedulian, ketidakpercayaan, dan rendahnya minat warga negara terhadap proses dan institusi politik. Menurut Putnam (2000), apatisme politik muncul ketika individu merasa partisipasi mereka tidak berdampak signifikan terhadap hasil politik, sehingga menurunkan motivasi untuk terlibat. Sikap ini juga berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor dan institusi politik, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi (Maslan, 2025). Variabel ini terdiri dari lima indikator utama: Ketidakpedulian terhadap isu politik, Ketidakpercayaan terhadap institusi politik, Rendahnya minat berpartisipasi dalam politik, Perasaan tidak berdaya secara politik, sikap sinisme terhadap aktor politik.

Kualitas Pemerintahan

Kualitas pemerintahan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip good governance, sebagaimana dijelaskan oleh (Israr & Syofyan, 2022) yang menekankan pentingnya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, Worldwide Governance Indicators mengoperasionalkan kualitas pemerintahan ke dalam beberapa dimensi utama, seperti efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan rule of law. Dalam penelitian ini, variabel kualitas pemerintahan diukur melalui enam indikator utama, yaitu transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, supremasi hukum, serta kontrol terhadap korupsi.

Gambar 4
Apatisme Politik, Kualitas Pemerintahan



Sumber: (Maslan, 2025), (Israr & Syofyan, 2022)

Berdasarkan Gambar 4. Hubungan antara variabel-variabel dapat diasumsikan sebagai berikut:

H1: Apatisme Politik memiliki dampak yang signifikan dengan Kualitas Pemerintahan

Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan yang kompleks antar variabel laten, dalam hal ini Apatisme Politik dan Kualitas Pemerintahan.

Langkah-langkah Analisis

1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Tahap awal analisis adalah menguji validitas dan reliabilitas model pengukuran untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten.

1. Validitas konvergen : Validitas konvergen diuji melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dianggap memenuhi kriteria apabila nilai AVE lebih dari 0,50, yang menunjukkan bahwa indikator mampu merepresentasikan variabel yang diukur dengan baik.
2. Reliabilitas: Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha. Konstruk dinyatakan reliabel apabila kedua nilai tersebut lebih dari 0,70, yang menandakan adanya konsistensi internal antar indikator.

2. Uji R-Square (R^2)

Setelah model dinyatakan valid dan reliabel, langkah berikutnya adalah menguji nilai R-square (R^2). Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model. Menurut Chin (1998), semakin tinggi nilai R^2 ,

maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan varians data. Kriteria interpretasi nilai R^2 adalah sebagai berikut :

1. $R^2 = 0,19 \rightarrow$ kategori rendah
2. $R^2 = 0,33 \rightarrow$ kategori sedang
3. $R^2 = 0,67 \rightarrow$ kategori tinggi

3. Uji hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan teknik bootstrapping yang tersedia dalam SmartPLS. Teknik ini digunakan untuk memperoleh nilai t-statistik dan p-value, sehingga dapat diketahui apakah hubungan antar variabel dalam model bersifat signifikan atau tidak.

1. Kriteria pengujian hipotesis ditentukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu nilai t-statistik dan p-value. Suatu hubungan antar variabel dinyatakan signifikan apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima secara statistik.

Melalui uji ini, penelitian menguji pengaruh Apatisme Politik terhadap Kualitas Pemerintahan, sekaligus memastikan apakah hubungan yang ditemukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

Demografi Responden

Sebanyak 100 responden berpartisipasi dalam survei. Penyebaran demografisnya sebagai berikut:

No	Deskripsi	Measurement	Persentase	Skor
1.	Usia	17-23	80	80%
		24-27	10	10%
		28-33	7	7%
		34>	3	3%
	Total	100		100%

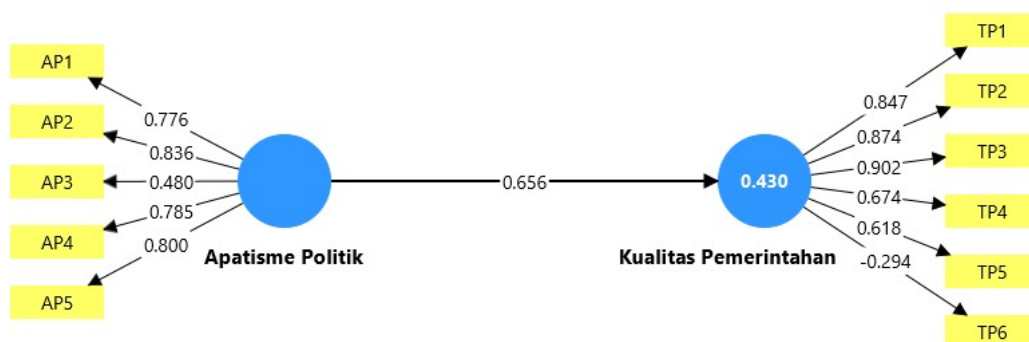
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	63	63%
		Perempuan	37	37%
	Total		100	100%
3.	Tingkat Pendidikan	SD/SMP	3	3%
		SMA/SMK	75	75%
		D3	7	7%
		D4/S1	14	14%
		S2	1	1%
		S3	0	0%
	Total		100	100%

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SmartPLS

Data demografis ini memberikan konteks penting untuk memahami Apatisme Politik yang bervariasi. Bagian berikut ini menyajikan temuan dari sebuah studi yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Apatisme politik bagi masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Analisis ini meneliti hubungan antara Apatisme Politik dan Kualitas Pemerintahan. Hubungan ini dianalisis menggunakan pendekatan model persamaan struktural (SEM), seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini.

Visualisasi Model Struktur

Gambar 5. Grafik koefisien jalur



Hasil analisis menggunakan metode PLS-SEM menunjukkan bahwa apatisme politik memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kualitas pemerintahan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,656. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap politik ternyata berperan penting dalam membentuk kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,430 mengindikasikan bahwa apatisme politik mampu menjelaskan sekitar 43% variasi dalam kualitas pemerintahan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dalam konteks ilmu pemerintahan, nilai ini tergolong moderat, yang berarti model yang digunakan sudah cukup baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, meskipun belum sepenuhnya menjelaskan keseluruhan faktor yang ada.

Dilihat dari model pengukuran, sebagian besar indikator pada variabel Apatisme Politik menunjukkan nilai loading yang baik. Indikator AP1, AP2, AP4, dan AP5 memiliki nilai di atas 0,70, yang berarti indikator-indikator tersebut cukup konsisten dalam merepresentasikan konstruk apatisme politik. Dilihat dari model pengukuran, sebagian besar indikator pada variabel Apatisme Politik menunjukkan nilai loading yang baik. Indikator AP1, AP2, AP4, dan AP5 memiliki nilai di atas 0,70, yang berarti indikator-indikator tersebut cukup konsisten dalam merepresentasikan konstruk apatisme politik.

Pada variabel Kualitas Pemerintahan, sebagian besar indikator menunjukkan nilai loading yang kuat, terutama TP1, TP2, dan TP3, yang mencerminkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pemerintahan. Sementara itu, indikator TP4 dan TP5 masih berada pada batas toleransi yang dapat diterima. Indikator TP6 menunjukkan nilai loading negatif (-0,294), yang mengindikasikan adanya perbedaan arah persepsi responden terhadap indikator tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat pernyataan terbalik atau adanya ketidaksesuaian persepsi responden terhadap aspek tertentu dari kualitas pemerintahan.

Descriptive Statistics (n = Number of Respondents)

Tabel n-statistic

	n	Minimum	Median	Maximum	Mean	Standard Deviation
Apatisme Politik	100	1.000	4.000	5.000	3.930	0,970
Kualitas Pemerintahan	100	1.000	5.000	5.000	3.910	0,860

Berdasarkan hasil statistik deskriptif indikator yang dihasilkan melalui pendekatan SmartPLS, dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator pada variabel yang diuji telah memenuhi karakteristik data yang layak untuk analisis model struktural. Indikator AP1–AP5 dan TP1–TP6 tidak memiliki data hilang (missing value = 0), yang menunjukkan kualitas pengumpulan data yang baik serta konsistensi responden dalam mengisi kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan berada pada rentang 1 hingga 5, dan seluruh indikator menunjukkan nilai minimum dan maksimum teramati yang sesuai dengan batas skala, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat penyimpangan pengukuran (out of range).

Ditinjau dari nilai mean, mayoritas indikator menunjukkan skor rata-rata yang relatif tinggi, khususnya pada indikator AP4 (mean = 4,360), TP2 (mean = 4,390), TP3 (mean = 4,340), TP4 (mean = 4,510), dan TP5 (mean = 4,230). Hal ini menunjukkan bahwa responden secara umum memberikan penilaian yang cenderung positif terhadap pernyataan-pernyataan yang merepresentasikan konstruk yang diteliti. Nilai rata-rata (mean) yang berada di atas titik tengah skala (3,00) mencerminkan adanya persepsi yang relatif kuat dan konsisten terhadap variabel laten. Dengan demikian, kondisi ini turut memperkuat validitas substantif dari indikator-indikator yang digunakan dalam merepresentasikan konstruk penelitian.

Selanjutnya, nilai median yang dominan berada pada angka 4 dan 5 memperkuat temuan bahwa sebagian besar responden memilih kategori “setuju” hingga “sangat setuju”. Kondisi ini menunjukkan tingkat keseragaman jawaban yang cukup baik, terutama pada indikator TP2, TP3, TP4, dan TP5 yang memiliki median 5. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan memiliki daya representasi yang kuat terhadap konstruk laten dalam model SmartPLS. Sebaliknya, indikator TP6 memiliki nilai mean (1,790) dan median (2,000) yang relatif rendah dengan rentang skala maksimum hanya sampai 3, yang

mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik indikator ini dibandingkan indikator lainnya, serta mencerminkan kecenderungan responden untuk tidak menyetujui pernyataan yang diajukan.

Dari aspek dispersi data, nilai standard deviation seluruh indikator berada pada rentang yang moderat, yaitu antara 0,755 hingga 1,074. Hal ini menunjukkan bahwa variasi jawaban responden masih dalam batas wajar dan tidak mengindikasikan adanya penyimpangan ekstrem. Indikator dengan standar deviasi yang relatif rendah, seperti TP4 (0,755) dan TP2 (0,786), mencerminkan tingkat konsistensi jawaban responden yang tinggi.

Hasil pengukuran reliabilitas dan validitas

	Alpha Cronbach	Composite Reliability (rho_A)	Composite Reliability (rho_C)	Extracted Average Variance (AVE)	
Apatisme Politik	0.812	0,849	0,859	0,557	Valid
Kualitas Pemerintahan	0,737	0,863	0,825	0,536	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan SmartPLS, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan. Pada variabel Apatisme Politik, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,812 menunjukkan bahwa indikator-indikatornya memiliki konsistensi internal yang baik, karena sudah melewati batas minimum 0,70. Hal ini juga didukung oleh nilai composite reliability—baik rho_a (0,849) maupun rho_c (0,859)—yang menunjukkan bahwa konstruk ini cukup andal dan stabil dalam pengukurannya.

Untuk variabel Kualitas Pemerintahan, hasilnya juga menunjukkan reliabilitas yang memadai. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,737 masih berada dalam kategori yang dapat diterima. Selain itu, nilai composite reliability rho_a (0,863) dan rho_c (0,825) juga sudah di atas 0,70. Ini berarti indikator-indikator pada variabel tersebut mampu merepresentasikan konstruk secara konsisten, sehingga layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Dari sisi validitas konvergen, kedua variabel juga telah memenuhi kriteria. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk Apatisme Politik sebesar 0,557 dan untuk Kualitas Pemerintahan sebesar 0,536, yang keduanya berada di atas batas minimum 0,50. Mengacu pada (Hair, 2018), hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten masing-masing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan sudah cukup baik dalam merepresentasikan variabel yang diteliti.

R-square

	R-square
Kualitas Pemerintahan	0.430

Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,430 atau 43,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 43,0% variasi pada variabel dependen, yaitu kualitas pemerintahan. Sementara itu, sisanya sebesar 57,0% variasi dalam kualitas pemerintahan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti kemungkinan adanya variabel moderasi, mediasi, maupun variabel kontrol lain yang relevan namun belum dianalisis.

Nilai R-square sebesar 0,430 dalam penelitian ini berada di bawah ambang batas Nilai R-square sebesar 0,430 dalam penelitian ini berada sedikit di bawah kategori moderat, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sedang menuju lemah. Meskipun demikian, dalam konteks penelitian ilmu sosial dan manajemen terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia maupun dinamika pemerintahan nilai R-square pada kisaran 0,30–0,50 masih tergolong dapat diterima (acceptable) dan cukup lazim ditemukan (Chin, 2014). Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pemerintahan, yang umumnya tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh hanya melalui beberapa variabel independen saja.

Nilai R-square yang diperoleh menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah cukup mampu menjelaskan fenomena yang diteliti, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Artinya, model ini sudah bekerja dengan baik, tetapi belum sepenuhnya menangkap semua faktor yang memengaruhi kualitas pemerintahan. Karena itu, penelitian selanjutnya

disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih beragam, seperti faktor institusional, budaya organisasi, atau faktor eksternal lainnya agar kemampuan prediksi model bisa lebih kuat. Selain itu, dalam menafsirkan nilai R-square, sebaiknya juga memperhatikan *adjusted R-square*, supaya tidak terjadi penilaian yang terlalu berlebihan akibat penambahan variabel yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam model.

Hipotesis test

	Original Sample (O)	Average Sample (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Value	
Apatisme Politik > Kualitas Pemerintahan	0.656	0.673	0.074	8.869	0.000	

Berdasarkan Tabel X, koefisien jalur antara apatisme politik dan kualitas pemerintahan sebesar 0,656 dengan nilai t-statistik 8,869 dan p-value 0,000. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

Besarnya koefisien 0,656 menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua variabel. Mengacu pada Hair et al. (2017), nilai di atas 0,50 dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang substansial. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi apatisme politik dalam masyarakat, justru diikuti oleh meningkatnya persepsi terhadap kualitas pemerintahan. Dalam beberapa literatur, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk stabilitas sosial-politik, di mana tingkat apatisme tertentu tidak selalu bermakna negatif, tetapi bisa mencerminkan sistem pemerintahan yang dianggap berjalan cukup baik (Huntington, 1968; Putnam, 2000).

Selain itu, nilai t-statistik yang tinggi menunjukkan bahwa hubungan ini sangat kuat secara statistik dan kecil kemungkinan terjadi secara kebetulan. Konsistensi antara nilai koefisien

awal (0,656) dengan sample mean (0,673), serta rendahnya standar deviasi (0,074), juga menunjukkan bahwa hasil estimasi melalui bootstrapping cukup stabil dan dapat dipercaya. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa apatisme politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan dapat diterima. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika hubungan antara sikap masyarakat terhadap politik dan kinerja pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuka peluang bagi studi selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut kemungkinan adanya mekanisme mediasi atau moderasi yang memengaruhi hubungan tersebut.

DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apatisme politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan di Kota Tangerang. Hal ini terlihat dari koefisien jalur sebesar 0,656 dengan nilai t-statistik 8,869 serta p-value 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat apatisme politik di masyarakat, justru diikuti oleh semakin tingginya persepsi terhadap kualitas pemerintahan, yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kualitas pelayanan publik, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,430 menunjukkan bahwa apatisme politik mampu menjelaskan sekitar 43% variasi dalam kualitas pemerintahan. Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti variabel mediasi, moderasi, atau faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam analisis. Secara umum, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa apatisme politik tidak selalu berdampak negatif. Dalam kondisi masyarakat yang relatif stabil, tingkat apatisme tertentu justru dapat mencerminkan adanya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, sehingga keterlibatan politik yang aktif tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan utama (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Temuan ini bertolak belakang dengan sebagian besar literatur yang menggambarkan apatisme politik sebagai faktor penghambat kualitas pemerintahan. Misalnya, (Nweke et al., 2019) menyatakan bahwa apatisme politik melemahkan mekanisme pengawasan publik, sehingga menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Demikian pula, (Andriyendi et al., 2023) menemukan hubungan negatif antara apatisme dan prinsip good governance di Indonesia, di mana rendahnya partisipasi masyarakat menghambat

responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik. Namun, dalam penelitian ini, pengaruh positif dapat dijelaskan oleh konteks lokal Kota Tangerang, di mana masyarakat mungkin memandang apatisisme sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem pemerintahan yang relatif stabil pasca-reformasi. Hal ini didukung oleh (Prasetyo et al., 2022), yang menunjukkan bahwa di masyarakat urban Indonesia, apatisisme sering kali muncul dari persepsi bahwa kebijakan pemerintah sudah memadai, sehingga mengurangi dorongan untuk intervensi politik aktif.

Lebih lanjut, analisis ini sejalan dengan studi tentang disengagemen politik di kalangan pemuda. Menurut (Ayu Pratiwi, 2024), dalam *Political Disengagement Among Youth*, apatisisme tidak selalu menandakan ketidakpedulian total, melainkan pergeseran bentuk partisipasi dari konvensional ke non-konvensional, seperti melalui media sosial, yang dapat mempertahankan kualitas governance tanpa partisipasi elektoral tinggi. Di sisi lain, (Jungkunz & Marx, 2025) dalam *Some Determinants of Political Apathy* menyoroti bahwa apatisisme sering dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan kepercayaan institusional, yang dalam kasus ini mungkin berkontribusi pada stabilitas pemerintahan. Temuan serupa ditemukan oleh (Siregar, 2024) dalam *Local Passion and National Apathy*, yang mengungkapkan bahwa apatisisme nasional tidak selalu berdampak negatif pada governance lokal, karena fokus masyarakat pada isu lokal dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Dari perspektif global, OECD (2024) dalam *Lack of Trust in Institutions and Political Engagement* menyatakan bahwa apatisisme politik sering kali muncul dari rendahnya kepercayaan, tetapi dapat diatasi melalui peningkatan transparansi, yang pada akhirnya memperkuat kualitas pemerintahan. Hal ini kontras dengan (Hobbs & Hobbs, 2025), yang melalui konsep *social capital* menegaskan bahwa apatisisme melemahkan modal sosial dan legitimasi pemerintahan. Namun, dalam konteks Indonesia, (Cabui, 2022) menekankan bahwa apatisisme sebagai bentuk ketidakpuasan dapat mendorong reformasi internal pemerintahan untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, (Marentin & Poernomo, 2025) dalam *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism* menemukan bahwa apatisisme politik di negara berkembang sering kali bersifat sementara dan dapat berubah menjadi

partisipasi jika pemerintahan menunjukkan performa yang baik, yang mendukung temuan positif di penelitian ini.

Implikasi teoritis dari hasil ini memperkaya teori partisipasi politik dan good governance. Secara teoritis, penelitian ini menantang asumsi linier bahwa partisipasi tinggi selalu menghasilkan governance berkualitas tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh (Maolani et al., 2023) dalam *Voice and Equality*. Sebaliknya, apatisme dapat menjadi indikator stabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Huntington (1968) dalam *Political Order in Changing Societies*. Implikasi praktis bagi pemerintahan Kota Tangerang adalah perlunya strategi untuk membedakan antara apatisme destruktif dan adaptif. Pemerintah dapat meningkatkan literasi politik tanpa memaksa partisipasi, misalnya melalui program edukasi digital untuk mengurangi sinisme (Mozin et al., 2025). Selain itu, temuan ini merekomendasikan integrasi variabel seperti kepercayaan institusional dalam model PLS-SEM masa depan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, sampel terbatas pada 100 responden di Kota Tangerang, yang mungkin tidak merepresentasikan populasi nasional, sehingga generalisasi terbatas (Lestari et al., 2023). Kedua, penggunaan pendekatan PLS-SEM rentan terhadap bias common method, karena data diperoleh dari survei self-reported. Ketiga, interpretasi pengaruh positif apatisme memerlukan penelitian longitudinal untuk memverifikasi kausalitas, karena data cross-sectional tidak dapat menangkap dinamika waktu (Chin, 2014).

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel mediasi seperti literasi politik atau moderasi oleh faktor demografi, seperti usia dan pendidikan (Ahaya et al., 2025). Selain itu, perbandingan antar-kota di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih luas tentang variasi konteks (Anggraini et al., 2022). Akhirnya, integrasi data kualitatif, seperti wawancara mendalam, dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme di balik hubungan ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empirik bahwa apatisme politik dapat menjadi katalisator positif bagi kualitas pemerintahan dalam konteks tertentu, sehingga mendorong pemikiran ulang tentang strategi peningkatan partisipasi politik di masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh apatisme politik terhadap kualitas pemerintahan di Kota Tangerang dengan pendekatan kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa apatisme politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan, yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,656, nilai t-statistik 8,869, serta p-value 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat apatisme politik dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula persepsi terhadap kualitas pemerintahan, yang mencakup dimensi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kualitas pelayanan publik, supremasi hukum, serta pengendalian korupsi. Di samping itu, nilai R-square sebesar 0,430 menunjukkan bahwa apatisme politik mampu menjelaskan sekitar 43% variasi dalam kualitas pemerintahan. Sementara itu, sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti faktor institusional, budaya organisasi, maupun variabel eksternal lainnya yang belum dianalisis dalam penelitian ini.

Temuan mengenai pengaruh positif ini juga memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar literatur sebelumnya yang umumnya mengasumsikan adanya hubungan negatif antara apatisme politik dan kualitas pemerintahan (Nweke et al., 2019; Dewi et al., 2022; Prasetyo et al., 2022). Dalam konteks Kota Tangerang, apatisme politik tampaknya mencerminkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang relatif stabil dan efektif, di mana rendahnya partisipasi aktif tidak serta merta melemahkan prinsip-prinsip good governance. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa apatisme dapat menjadi indikator kepuasan terhadap performa pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Huntington (1968) dan Putnam (2000), di mana stabilitas politik tidak selalu bergantung pada partisipasi elektoral yang tinggi.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu pemerintahan dengan menantang asumsi linier bahwa partisipasi politik tinggi selalu menghasilkan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Apatisme politik, dalam kondisi tertentu, dapat berfungsi sebagai sinyal bahwa mekanisme governance telah berjalan cukup baik tanpa memerlukan intervensi masyarakat yang intensif. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah

Kota Tangerang tidak perlu langsung memandang apatisme politik sebagai ancaman. Sebaliknya, kondisi tersebut juga bisa dilihat sebagai sinyal untuk terus memperkuat kinerja kelembagaan, terutama melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tanpa harus selalu menuntut partisipasi politik yang bersifat konvensional. Pendekatan lain seperti penguatan literasi politik digital serta komunikasi kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif dapat menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu 100 responden, serta penggunaan data cross-sectional yang belum memungkinkan penarikan kesimpulan kausal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar, pendekatan longitudinal, serta menambahkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap institusi, literasi politik, atau faktor demografis, agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa apatisme politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan di Kota Tangerang. Temuan ini memberikan kontribusi empirik baru dalam memahami dinamika hubungan antara sikap masyarakat terhadap politik dan performa pemerintahan lokal, sekaligus mendorong paradigma yang lebih nuansa dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi dan good governance di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyanaesa, P. B., & Utama, I. W. (2023). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. 7(1), 23–27.
- Ahaya, D. V., Kamuli, S., & Hamim, U. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 115–124. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4940>
- Alfarisyi, M. D., Studi, P., Pancasila, P., Keguruan, F., Hasani, N. Al, Studi, P., Pancasila, P., & Keguruan, F. (2023). *Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi*. 8(1), 60–68.

- Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). *Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada*. 3(1), 101–111.
- Anggraini, D., Ariesta, A. W., & Wuryanta, A. G. E. W. (2022). *TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN RI 2019*. 11(1), 1–12.
- Arniti, N. K. (2020). *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR* Ni Ketut Arniti *Korespondensi* : 4(39), 329–348.
- Aryadi, L. S. P. (2024). *Peranan Generasi Z Dalam Bidang Politik Pemilu 2024*.
- Asgar, S. (2023). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah*. 3, 5982–5994.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). *PARTISIPASI POLITIK*. 6, 585–610.
- Awaliah, A. F., Rahmawati, F., Fadilah, J., Nafis, M., Syahbani, M. R., Fitriah, N., & Solihin, S. (2024). *Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif*. 2(2023), 1087–1092.
- Ayu Pratiwi, D. (2024). Analisis Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Journal Politics and Government*, 1(2), 140–147. <http://ejournal.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/jpg>
- Ayunda, N. D., Zusrieka, M., Pramesyanti, C. Z., Kahar, M., & Ramzy, M. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 : Studi Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi dan Faktor yang Mempengaruhinya*. 1, 1–10.
- Azan, A. R., Hanif, A., Fitri, A. T., Daerah, P., & Publik, P. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. 19(1), 39–46.
- Cabui, C. E. (2022). *REFLEKSI KINERJA PEMERINTAHAN PADA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN*. 1(April), 221–225.
- Chin, W. W. (2014). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. January 1998.
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Sage Publishing* (Fifth Edit). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Dewi, L. Y., Laritza, H., & Sinaga, N. (2022). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*. 8, 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., & Gunanto, D. (2022). *MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI*. 3(1). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Edwards, B. O. B., & Foley, M. W. (1998). *American Behavioral Scientist*. <https://doi.org/10.1177/0002764298042001010>
- Hafizi, R. (2023). *Social Science Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Politik dan Partisipasi Politik*. 1–4.
- Hair, J. F. (2018). *When to use and how to report the results of PLS-SEM*. December. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hapsari, M. A. (2022). *Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara : Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta*. 2(2), 105–117.
- Hidayat, R., & Ramadhan, R. (2025). *PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKONSTRUKSI OPINI*

PUBLIK TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH : STUDI KASUS WACANA PUBLIK TAHUN 2025. 1, 64–75.

- Hidayati, R., & Suwanda, I. M. (2022). *UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI MEDIA CENTER SURABAYA SEBAGAI WUJUD GOOD RIRIN Hidayati I Made Suwanda. 10(2018), 824–841.*
- Hobbs, J., & Hobbs, J. (2025). Philosophy Between activism and apathy : global structural injustice and ordinary citizens injustice and ordinary citizens. *Critical Review of International Social and Political Philosophy, 00(00), 1–24.*
<https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2588077>
- Huljanna, Y. M. (2022). *Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. 3(2).* <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G. K. (2021). *Journal of Political Issues Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber. 3, 1–12.*
- Inzana, N., Maulana, A. A., & Sari, P. M. (2024). *Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. 05(02), 1–13.*
- Iskandar, A., Putra, P., & Roni, M. (2021). *GOOD GOVERNANCE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI. 11.*
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1,2. 4(4), 686–697.*
- Jungkunz, S., & Marx, P. (2025). Pathways to politics : a sequence analysis of political apathy and involvement. *West European Politics, 0(0), 1–28.*
<https://doi.org/10.1080/01402382.2025.2543204>
- Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). *ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA : akses perempuan ke arena politik , kesenjangan gender masih menjadi masalah yang signifikan yang berbeda (Rasyidin and Aruni 2016). ketidaksetaraan yang ada .(Rasyidin and Aruni 2016) sistem politi. 8(1).*
- Kompasiana.com. (2024). *Apatisme: Apakah Politik Sudah Tidak Menarik Bagi Generasi Muda?* Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/rnanda0114/675a9f2f34777c55ec2e28a2/apatisme-apakah-politik-sudah-tidak-menarik-bagi-generasi-muda>
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya, 1(3), 75.* <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i3.364>
- Made, N., & Darma, A. (2025). *ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020). 9(1), 105–120.*
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., Fikry, E., & Huda, A. (2023). *Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di indonesia. 21(2), 1–7.*
- Marentin, C., & Poernomo, M. I. (2025). *Distribusi Pesan Politik Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Golkar Jakarta Barat Pada Pemilu 2024. 8(1), 39–49.*
- Marhadila, F., Firdaus, F. P., Dewi, I., Kadilla, R., & Apriliani, P. F. (2024). *Optimalisasi*

- Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat. 01(04), 811–823.*
- Maslan, D. (2025). *Politik sebagai mata pelajaran mandiri: solusi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda.*
- Mii, R., Reza, M., Latuda, F., Gorontalo, U., & Gorontalo, U. N. (2023). *Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. 3, 139–153.*
- Mozin, S. Y., Sulila, V. V. V., & Yusuf, A. N. (2025). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 202-211. 7(2), 202–211.*
- Nagar, V., & Pradesh, U. (2023). *A THEORETICAL UNDERSTANDING OF. 2(1), 39–47.*
- Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. 1, 40–52.*
- Nweke, K., Ph, D., & Etido-inyang, E. (2019). *National Elections and Political Apathy: A Comparative Study of Voter Turnout in the 2019 General Elections of Nigeria and South Africa. 5(12), 643–654.*
- Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). *Bab i. pendidikan politik generasi muda melalui gerakan voluntarisme komunitas milenial. 1–29.*
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). *Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024. 1(11), 2986–2993.*
- Putra, A., Rajab, M., Ode, L., & Adam, M. (2025). *Dinamika Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilu di Era Media Sosial. 3, 125–130.*
- Ramadhan, R., Hafni, N., & Sos, S. (2024). *Jurnal Administrasi Publik Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Jurnal Administrasi Publik. November 2022, 55–67. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v0i0.0000>*
- Rasyd Gunawan, H. N. (2025). *PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN: ANALISIS PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA THE LEVEL OF EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF NON-CASH TICKET PAYMENT SYSTEMS IN REDUCING THE RISK OF FRAUD: A CASE STUDY AT THE. 4(9), 3011–3020.*
- Riyanti, R., Hukum, F., Pahlawan, U., Tambusai, T., Luthfi, A., Pahlawan, U., Tambusai, T., Rohana, D., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. (2023). *Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. 1(July), 26–31.*
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). *PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Oleh: 95, 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>*
- Salma, S. M., & Muslim, J. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Purwakarta Pada Pilkada 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pemilu. 50, 190–198.*
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2025). *Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>*
- Siregar, I. (2024). *Phenomenological Review of the Issue of Political Apathy of Indonesia's Young Generation. 135–147.*
- Sukawati, I. K., Putra, L., Najicha, F. U., & Mahasaraswati, U. (2022). *Jurnal Discretie: Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat Jurnal Discretie: 3(3), 170–181.*
- Wole, B. D., Purwaningsih, A., & Sasmito, C. (2021). *Analisis Kebijakan Smart City Pada Among Tani untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan*

Good Governance smart city atau Kota Pintar . keunggulan mulai dari kuantitas penduduk , infastruktur , tatanan masyarakat , dan tersebut menunj. 3(1), 58–67.
<https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9344>